



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

### Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

#### I. DATA PRIBADI

1. Nama : AISYAH ANDRIANI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 1021110

#### II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.480.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/69 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	70.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.700.000.000
III. HUTANG	Rp.	800.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.900.000.000

#### Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.